

# STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA MEMBANGUN COMMUNITY RESILIENCE DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME(STUDI KASUS PELAKU BOM BUNUH DIRI DI SURABAYA TAHUN 2018)

## GOVERNMENT STRATEGY OF SURABAYA CITY TO BUILD COMMUNITY RESILIENCE IN TREATING TERRORISM ACTION (CASE STUDY OF BOMBING PERSONS KILLINGSELF IN SURABAYA, 2018)

Angga Putera Pratama<sup>1</sup>, Suhirwan<sup>2</sup>, Yusuf<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN,  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(Angga.pratama@idu.ac.id, suhirwan32@gmail.com, hyusup.ijabah@yahoo.co.id)

**Abstrak** – Terorisme merupakan tindak kejahatan menentang hukum dengan unsur ancaman dan kekerasan yang mengancam keselamatan publik. Terorisme hidup di masyarakat dan kapan saja dapat membahayakan. Seperti tragedi bom bunuh diri tahun 2018 yang terjadi di Surabaya. Dibutuhkan peran masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan aksi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaku bom bunuh diri 2018 yang bermukim di Surabaya masih leluasa melancarkan serangan bom tanpa terdeteksi oleh pihak keamanan maupun masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi Pemerintah Kota Surabaya membangun *community resilience* dalam menanggulangi terorisme, serta mengidentifikasi dan menemukan faktor pendorong dan penghambat dalam upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dari penelitian ini didapat melalui langkah wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah melalui teknik analisa data berdasarkan Miles-Huberman, Saldana (2014). Hasil dari penelitian ini adalah aksi terorisme menjadi ancaman yang berdampak trauma bagi masyarakat Surabaya. Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun ketahanan komunitas adalah dengan melibatkan jaringan ibu-ibu pemantau jentik dan penerapan aplikasi Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk) bagi para ketua RT/RW dan pengurus masjid dengan tujuan memantau mobilitas kependudukan warga, ceramah keagamaan dan lapor cegah dini mengenai aktivitas masyarakat yang mencurigakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terorisme berdampak signifikan bagi keamanan masyarakat. Ketahanan komunitas menjadi strategi penanggulangan terorisme yang perlu terintegrasi secara nasional, internal, maupun eksternal.

**Kata Kunci:** Strategi, Penanggulangan Terorisme, Ketahanan Komunitas, Surabaya

**Abstract** – *Terrorism is a crime against the law with elements of threats and violence that threaten public safety. Terrorism lives in society and can be dangerous at any time. Like the 2018 suicide bomb tragedy that occurred in Surabaya. It takes the role of the community to be involved in countering acts of terrorism carried out by the Government. The problem in this research is that the 2018 suicide bombers who live in Surabaya are still free to launch bomb attacks without being detected by the security forces or the surrounding community. The purpose of this study is to analyze the strategy of the Surabaya City Government to build community resilience in tackling terrorism, as well as to identify*

and find the driving and inhibiting factors in these activities. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data from this study were obtained through interview and documentation steps. Then processed through data analysis techniques based on Miles-Huberman, Saldana (2014). The result of this research is that acts of terrorism are a threat that has a traumatic impact on the people of Surabaya. The strategy of the Surabaya City Government in building community resilience is to involve a network of larva monitoring women and the application of the Sipandu (Population Monitoring Information System) application for RT / RW heads and mosque administrators with the aim of monitoring population mobility, religious lectures and early preventive reports on suspicious public activity. The conclusion of this study is that terrorism has a significant impact on public security. Community resilience is a strategy to counter terrorism that needs to be integrated nationally, internally and externally.

**Key words:** Strategy, Counter-terrorism, community resilience, Surabaya

## **Pendahuluan**

Terorisme merupakan ancaman nyata yang sangat membahayakan kelangsungan masa depan kerukunan dan kenyamanan hidup manusia. Pasca insiden serangan teror yang dilakukan oleh kelompok yang disinyalir sebagai komplotan Osama Bin Laden di Gedung *world trade center* (WTC), New York, Amerika Serikat. Sejak kejadian tersebut Amerika Serikat langsung mengampanyekan bahwa terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan dan memulai agenda internasional untuk memerangi terorisme. (Roach, 2011)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, disebutkan

dalam pasal 1 ayat (2) bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. (UU Nomor 5, 2018)

Strategi menyiapkan ketahanan masyarakat (*Community Resilience*) merupakan bagian dari kesiapsiagaan nasional yang secara jelas sudah termuat dalam pasal 43B Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menyebutkan bahwa kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan

peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) dilaksanakan dengan beberapa cara yakni; mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme; menyampaikan dan menerima informasi tentang pencegahan tindak pidana terorisme kepada dan dari masyarakat; memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak tindak pidana terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP Nomor 77, 2019)

Maraknya warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Al-

Syam) menjadi sebuah fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Sebagaimana diungkap oleh Tobing & Indradjaja "As the appeal of ISIS were spreading out, Indonesian jihadists started to actually join the fight,... The number kept growing that in 2017, Indonesian authority recorded that 671 Indonesians had tried to go to Syria, 99 of them were children" (Tobing, 2019).

Maraknya dukungan warga Indonesia kepada ISIS tidak hanya dilakukan dengan pergi langsung ke negara asalnya, namun juga dibarengi dengan beberapa aksi terorisme yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku menjadi kaki tangan dari ISIS (Tobing, 2019). Salah satunya adalah jaringan Jamaah Ansarul Daulat (JAD). Seperti diungkapkan oleh Rijal (2017) ISIS telah memiliki jaringan di Indonesia (Rijal, 2016). Jaringan tersebut bernama Jamaah Ansarul Daulat (JAD) yang merupakan gabungan dari sejumlah kelompok dan gerakan revivalisme Islam yang sebelumnya telah ada di Indonesia. JAD menjadi salah satu kelompok terorisme yang mulai aktif beberapa tahun belakangan ini. Beberapa aksi teror yang dilakukan JAD yaitu bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga (pengikut

JAD) di tiga gereja di Surabaya yang terjadi pada tahun 2018.

Bom bunuh diri ini dilakukan di 3 gereja Katolik di Kota Surabaya yaitu Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara, Gereja Kristen Indonesian (GKI) Surabaya di Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna. Ketiga Gereja Katolik ini termasuk gereja besar yang ada di Surabaya dan pada saat terjadi pengeboman sedang berlangsung kegiatan ibadah didalam 3 gereja tersebut.

Kejadian pengeboman pertama dilakukan oleh 2 orang kakak beradik di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela dengan menggunakan sepeda motor memasuki kompleks gereja dan kemudian meledak di antara para jemaat yang sedang berjalan kaki. Bom bunuh diri kedua dilakukan oleh tiga orang perempuan yang terdiri ibu dan 2 anaknya dengan menggunakan rompi dan berjalan kaki. Yang ketiga dilakukan oleh kepala keluarga dengan menggunakan mobil di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.

Kota Surabaya merupakan contoh dari sekian banyak daerah metropolitan yang ada di Indonesia. Secara geografis memiliki luas wilayah 326,36 km<sup>2</sup>. Batas Kota Surabaya sebelah utara yaitu Selat

Madura dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Secara administratif pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan pola ruang perkembangannya, Surabaya terklasifikasi dalam beberapa area, yakni : (Pemkot Surabaya, 2018)

1. Area untuk kegiatan Industri dan perdagangan yang terfokus di wilayah pesisir utara Kota Surabaya di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Teluk Lamong serta sebelah selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang terpusat di kawasan tengah kota. Pusat kota ini menjadi kawasan strategis ekonomi.
3. Area permukiman vertikal yang berupa rumah susun maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Surabaya, sedangkan area permukiman dioptimalisasikan

berkembang ke arah selatan, timur dan barat Kota Surabaya.

4. Area pesisir di tepian darat dimanfaatkan untuk permukiman nelayan, tambak ikan, tambak garam, pergudangan militer, pelabuhan, industry kapal, wisata pesisir dan kawasan lindung di Pantai Timur dimanfaatkan sebagai akses jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura melalui jembatan suramadu serta jembatan sukolilo sampai THP kenjeran yang membuka akses di wilayah sisi timur laut Kota Surabaya.

Area Ruang Laut yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional dan juga dikembangkan untuk penangkapan ikan tradisional.

Berdasarkan informasi di atas dapat kita pahami bahwa Kota dengan penduduk berjumlah 3,15 juta (BPS Kota Surabaya, 2020) tersebut merupakan kawasan strategis dengan teritorial terbuka yang berbatasan dengan daerah lain. Hal itu dapat menjadi gerbang bagi persebaran dan perpindahan manusia khususnya dari kabupaten yang ada di sekitarnya. hal ini menjadi bagian penting bagi Pemerintah Kota untuk melihat

dinamika pemahaman yang tumbuh di masyarakat. Interaksi dan setiap aktivitas yang ada di kampung harus dalam pengetahuan RT setempat.

Pasca ledakan bom di tiga gereja serta serangan bom di Mapolresta Surabaya. Pemerintah kota Surabaya selama dua hari langsung mendatangi gereja tempat ledakan terjadi, melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Surabaya, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), serta mendatangkan para psikolog dan psikiater dari Universitas Islam untuk melaksanakan trauma healing kepada anak-anak korban (Jatimpos.co, 2020). Hal tersebut juga dilakukan kepada anak-anak para pelaku untuk mengurangi rasa trauma dan melakukan deradikalisasi.

Selain itu, selepas seri ledakan bom di tiga gereja tersebut, dalam sebuah forum pertemuan bertempat di Aula Gedung Sawunggaling pada tanggal 30 Mei 2018, Pemerintah Kota Surabaya segera mengumpulkan kader ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) (detiknews.com, 2018). Kader ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) ini merupakan kader binaan Pemerintah Kota yang bertugas untuk melakukan

pemantauan jentik nyamuk di rumah-rumah warga di seluruh wilayah di Surabaya.

Ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) ini berada di bawah koordinasi puskesmas di setiap wilayah di Surabaya, terdiri dari ibu-ibu warga dan anggota ibu-ibu PKK setempat. Dalam forum pertemuan di aula Sawunggaling tersebut, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini meminta kepada segenap kader ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) untuk menjadi mata-mata dan ikut berperan dalam penanggulangan terorisme di Surabaya (Liputan6.com, 2018). Selain memantau jentik, mereka juga bertugas untuk mengamati situasi janggal dan gerak-gerik mencurigakan pemilik rumah.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, Walikota Tri Rismaharini menyatakan kepada kader ibu pemantau jentik (bu mantik) bahwa mereka tidak perlu menjadi seperti Detasemen Khusus 88 (Densus 88), kader bu mantik (ibu pemantau jentik) tersebut hanya diminta untuk menjadi mata mata dan segera melaporkan kepada RT/RW setempat jika ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan yang mengarah kepada indikasi dan atribut terorisme.

Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh *The International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ)* dengan tema “Peran Pemimpin Lokal dalam Merespon Serangan Terorisme”. Dalam kesempatan tersebut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memaparkan strategi penanggulangan terorisme pasca ledakan bom 2018. Tri Rismaharini menjelaskan adanya keterlibatan kelompok ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) dalam menanggulangi ancaman teror di Surabaya. Walikota Surabaya menjelaskan idenya untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota. Jumlah Ibu Pemantau Jentik (Bu Mantik) ada sekitar 22.000 orang. (Humas.surabaya.go.id, 2020)

Selain memaksimalkan jaringan ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) tersebut, Walikota Surabaya meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk). Salah satu cara yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengidentifikasi embrio radikalisme melalui pemantauan kependudukan. Aplikasi ini diluncurkan pasca tragedi bom di tiga gereja dan juga mapolresta Surabaya. Aplikasi Sipandu wajib diunduh oleh setiap ketua RT dan ketua RW. Melalui aplikasi tersebut diharapkan mampu

meningkatkan interaksi setiap ketua RT dan RW untuk mengawasi warganya. Selain itu, perpindahan penduduk secara administratif bisa dilaporkan melalui aplikasi Sipandu tersebut. (news.detik.com, 2018) Sehingga laporan dini terhadap perilaku mencurigakan dan bahaya terorisme dapat dihindari.

Untuk dapat mengakses aplikasi Sipandu tersebut, para ketua RT dan Ketua RW akan menerima *username* dan *password* dari kelurahan masing-masing. Aplikasi Sipandu akan berisi sejumlah pertanyaan mengenai aktivitas warga yang pergi dalam waktu lama, warga yang tidak tetap, serta melakukan pendataan penduduk yang bukan warga Surabaya (kumparan .com, 2018). Melalui aplikasi tersebut setiap ketua RT dan ketua RW wajib menjawab pertanyaan dan melaporkan kondisi warganya secara cepat. Tidak hanya ketua RT dan ketua RW, pengurus tempat ibadah juga akan dilibatkan untuk memantau aktivitas ceramah dan peredaran kelompok radikal di wilayah tempat ibadah masing-masing.

Dalam hal ini, sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi Sipandu terus dijalankan oleh tiga pilar di Surabaya yang terdiri dari; 1). Pemerintah Kota

Surabaya; 2). Komando Resor Militer (Korem) 084/Bhaskara Jaya; 3). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Tiga pilar Surabaya rutin menggelar koordinasi untuk melakukan pencegahan tindak terorisme dan juga sosialisasi aplikasi Sipandu (jatim.antaranews.com, 2018).

Dapat diketahui bahwa belum ada strategi penanggulangan aksi terorisme berbasis ketahanan komunitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebelum kejadian aksi bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018. Mengingat bahwa model serangan bom yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 merupakan motif serangan bom yang tergolong baru, karena melibatkan seluruh keluarga inti. Perlu adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman terorisme yang semakin berkembang.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Tahun 2018)

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Creswell berpendapat bahwa metode kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang berasal dari masalah kemanusiaan atau masalah sosial yang terjadi. Dalam melakukan proses penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan hingga melakukan analisis data secara induktif dan terakhir dengan menerjemahkan kompleksitas suatu permasalahan (Cresswell, 2016).

Tempat penelitian dalam tesis ini adalah Komando Distrik Militer (Kodim) Tipe A 0831/Surabaya Timur, sehingga Narasumber Utama dalam penelitian ini yaitu Komandan Rayon Militer (Danramil) 0831/05 Rungkut Surabaya. Sedangkan Narasumber Pendukung dalam penelitian ini yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya, Plt. Walikota Surabaya, Ketua RT/RW di Kawasan Perumahan Wisma Indah Blok K-22 yang menjadi rumah tinggal pelaku bom Surabaya 2018.

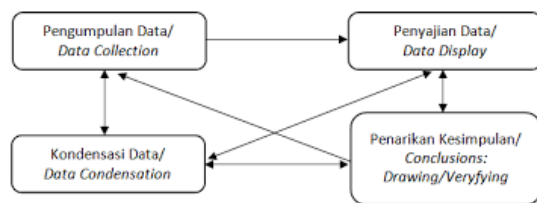
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi

pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) kepada para narasumber/informan kunci. Sementara itu untuk mengumpulkan data sekunder peneliti mendapatkannya secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dengan mencari data berupa laporan/dokumen/publikasi tertulis dari instansi yang bersangkutan. Sedangkan secara tidak langsung, peneliti mendapatkan data melalui publikasi di media massa tertulis, membuat terlebih dahulu instrumen panduan wawancara yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif.

Validitas atau keabsahan merupakan hal yang nisbi/relatif (Bachri, 2010). Maksud dari hal tersebut adalah didalam pengertian yang sesungguhnya, sebaiknya data diberikan nilai dalam kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai serta lingkungan penelitian yang sedang dilaksanakan. Keabsahan data bukanlah sekedar persoalan kesimpulan atau metode yang terlepas dari konteksnya. Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas

eksternal (*transferability*), reabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dicetuskan oleh Miles & Huberman (Sugiyono, 2019) yang mengkonsepkan teknik interaktif yang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Analisis Miles & Huberman

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

Fenomena terorisme tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menimbulkan banyak korban tewas dan luka-luka, kegemparan di seluruh Indonesia, dan trauma yang mendalam. Fenomena teror bom berhasil memantik emosi banyak pihak, mulai dari ketakutan, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, hingga kekejutan yang dialami oleh para korban, keluarga tersangka, kenalan tersangka, bahkan seluruh dunia. Bagi

Pemerintah Kota Surabaya, kasus bom bunuh diri tersebut merupakan terorisme dengan modus baru yang erat kaitannya dengan *community resilience*. Peristiwa tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Hal tersebut merupakan ancaman baru dalam tindak terorisme. Dalam *community resilience* dibutuhkan adanya kemampuan beradaptasi, kemampuan komunitas, partisipasi masyarakat serta peran pemimpin yang baik. Melihat dari kasus bom bunuh diri 2018 lalu, Pemerintah Kota Surabaya melihat bahwa terdapat titik kerentanan masyarakat yang merupakan faktor penghambat dari *community resilience* dalam penanggulangan terorisme. Luasnya wilayah Kota Surabaya dengan penduduk yang padat membuat kontrol terhadap penduduknya dapat dikatakan sulit. Terlebih, jumlah personel pengamanan yang minim menyebabkan pengawasan semakin sulit untuk dilakukan.

Untuk meminimalisir kasus sejenis yang kemungkinan dapat dilakukan oleh siapa saja, peran aktif masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi pengamanan wilayah. Di Kota Surabaya terdapat perkumpulan yang dinamakan dengan

Bumantik (ibu-ibu pemantau jentik). Fungsi dari Bu Mantik adalah untuk mengumpulkan informasi jika ada hal-hal yang dicurigai dalam pemukiman/perumahan setempat. Pelaksanaan dari Bu Mantik sudah cukup efektif, seperti apa yang disampaikan oleh Danramil 0831/05 Surabaya:

warga itu sering kumpul, cangkruk (nongkrong) gitu mas. Jadi seharusnya kalo ada apa-apa atau ada gelagat aneh dari sesama warganya mereka harusnya lebih paham. Kalau kita juga sering nyamperin mereka sewaktu lagi kumpul, ngobrol-ngobrol. Ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) juga ikut gerak ketika mereka masuk ke rumah-rumah warga, mereka sambil mengawasi ada tanda-tanda mencurigakan atau tidak. kalau ada pasti mereka langsung lapor ke RT atau RW. lalu RT/RW lapor melalui aplikasi Sipandu itu mas, tapi juga lapor ke kita via lisan kalau pas lagi kumpul bareng kita.... merka komunikatif mas, aktif masuk ke rumah-rumah sembari berkomunikasi baik dengan warga. Tidak hanya itu, bu mantik tersebut juga sering koordinasi baik dengan ketua RT maupun ketua RW kalau ada hal-hal yang tidak pada biasanya atau mencurigakan mereka langsung lapor ke ketua RT atau ketua RW. bu mantik memang sangat dekat

dengan warga, karena kerjanya ketemu warga, masuk ke rumah-rumah warga buat mengecek jentik di rumah warga (Wahono, 2021).

Kemudian, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dibidang informasi, DINKOMINFO Surabaya juga memiliki peran strategis dalam pemberian informasi jika terjadi ancaman-ancaman yang merugikan hajat hidup masyarakat Surabaya. Seperti pada kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Dita Oepriarto yang melakukan aksi terorisme di tahun 2018. Agus Son Haji selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya Tahun 2018 menilai bahwa ketahanan komunitas dalam lingkup masyarakat sangat penting karena masyarakat setempat kejadian memiliki keterikatan erat sebagai tetangga yang harus mengamati, peka dan peduli terhadap ancaman lingkungan sekitarnya, yang tentu harus ada kontrol dari pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Agus Son Haji menyampaikan bahwa:

“menurut saya itu sangat penting ya ketahanan komunitas itu, saya tidak tau banyak soal terorisme, tapi setau saya jaringan mereka kan hidup di tengah masyarakat, artinya masyarakat sendiri yang harus lebih

proaktif untuk melaporkan kepada pihak berwenang mengenai setiap situasi yang dihadapi di bawah. kalo pemerintah tidak mungkin mengcover seluruh keadaan yang ada di bawah” (Son Haji, 2021).

Pada tahap pengumpulan informasi, jaringan teroris JAD sudah lihai dalam mengecoh aktivitas dan personil intelijen. Bahkan menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mereka memiliki buku pegangan bagaimana menghindari komunikasi (intelijen dan polisi tidak bisa menyadap aplikasi *WhatsApp*), menangkal interogasi, pengawasan melekat (*surveillance*), dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan materi ledak yang mereka gunakan, seperti bom panci dan bom rakitan dari benda sehari-hari yang dapat dibeli secara legal dan mudah ditemukan. Kasus bom panci di Kampung Melayu pada 2017 adalah salah satunya. Ketika itu material bom adalah panci bertekanan tinggi berisi gotri, paku, dan mur. Walaupun bahan dan alatnya mudah, bom panci adalah salah satu bom yang daya fatalnya sangat tinggi. Kemudian, bahan ledak yang digunakan dalam aksi teror di Surabaya hasil rakitan Dita Oepriarto diketahui juga adalah bom kimia dari benda-benda rumahan.

### **Ends (Tujuan)**

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi yang memiliki keterlibatan dan keterkaitan langsung dalam upaya penanggulangan terorisme di Kota Surabaya. Pada dasarnya, tujuan masing-masing instansi terhadap pengurangan tindak pidana terorisme memiliki persamaan yaitu guna meminimalisir adanya tindak terorisme di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Surabaya. Keseluruhan instansi yang memiliki peran dalam penanggulangan terorisme di Surabaya sama-sama memiliki *ends* (tujuan) untuk mewujudkan dan membangun Surabaya menjadi Kota yang aman dan nyaman bagi penduduknya serta terhindar dari berbagai ancaman yang membahayakan, terlebih ancaman tindak pidana terorisme melalui bom bunuh diri.

### **Means (Sarana)**

*Means* memiliki arti sebagai sarana untuk menentukan kebijakan dan strategi pertahanan. *Means* dalam membangun *community resilience*, bahwa seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan memerlukan adanya strategi internal, eksternal dan nasional secara optimal guna meningkatkan *community resilience* masyarakat Kota Surabaya yang nantinya

dirumuskan melalui *ways* (cara) mempertahankan strategi pertahanan sesuai dengan teori strategi.

### **Ways (Cara)**

pengawasan merupakan cara yang sangat penting dalam membangun *community resilience* bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan terorisme. Pengawasan tersebut dilakukan secara keseluruhan, baik melalui lembaga pertahanan keamanan hingga lingkup terkecil dari lembaga masyarakat seperti RT/RW. Pengawasan oleh lembaga keamanan dalam hal ini adalah kepolisian (Polrestabes Surabaya) perlu melakukan kegiatan kontrol secara berkala untuk memastikan bahwa lingkungan wilayah Kota Surabaya terpantau aman. Adapun kontrol dari warga sekitar juga perlu ditingkatkan guna memahami secara langsung terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar. Terlebih, Kota Surabaya saat ini sudah memiliki aplikasi bernama SIPANDU serta komunitas yang bernama Bu Mantik dalam menjalankan fungsi *controlling* dalam membangun *community resilience* di Kota Surabaya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya Membangun**

### **Comunity Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya**

Perlu dipahami bahwa penanggulangan terorisme bukan hal yang mudah, terlebih ancaman nirmiliter yang satu ini kerap dengan modus-modus tidak terduga seperti apa yang dilakukan oleh Dita Oepriarto beserta isteri dan keempat anaknya. Hal tersebut membuktikan bahwa ketahanan komunitas sangat diperlukan guna mengurangi ancaman, pun ketahanan komunitas dapat terwujud dengan baik apabila terdapat ketahanan yang baik dalam lingkup keluarga. Sebelum adanya kejadian bom bunuh diri tahun 2018 di Surabaya, belum adanya *community resilience* secara maksimal, namun sudah ada sistem wajib lapor 2x24 jam bagi tamu ketika memasuki suatu kampung.

Sistem yang ada masih terbatas pada itu saja sehingga belum terbentuk *community resilience* secara terstruktur. *Community Resilience* atau resiliensi komunitas adalah kemampuan masyarakat untuk membangun, mempertahankan, atau mendapatkan kembali tingkat kapasitas masyarakat yang diharapkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan positif. Adaptasi komunitas termanifestasikan dalam kesejahteraan populasi, kesehatan

mental, fungsi dan kualitas hidup suatu komunitas (Van Breda, 2001). Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *community resilience* terkait penanggulangan terorisme yang juga didukung dengan 5 aspek menurut Fajber, 2009 yaitu aspek sumber daya, jaringan sosial, pendidikan, teknologi dan akses pembangunan.

kinerja yang bagus dengan disertai penyusunan anggaran yang sesuai merupakan faktor pendorong secara sumber daya. Kemudian pembentukan unit-unit khusus dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi terorisme merupakan akses pembangunan yang juga menjadi faktor pendorong bagi strategi pemerintah Kota Surabaya dalam membangun ketahanan komunitas dari segi akses pembangunan.

Selanjutnya, penggunaan aplikasi Sipandu (sistem informasi pantauan penduduk) merupakan faktor pendorong dari aspek teknologi, namun pemanfaatan data yang belum jelas menjadi variabel penghambatnya. Luasnya wilayah Kota Surabaya dan jumlah personel aparat keamanan yang terbatas menjadi faktor penghambat dari

aspek sumber daya. Proses sosialisasi dan edukasi (pendidikan) terhadap masyarakat menjadi faktor penting dalam membentuk *Community Resilience* di kota Surabaya.

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Sebelum adanya tragedi bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018, masyarakat Surabaya belum memiliki *community resilience* yang cukup baik, maka dari itu diperlukan adanya pembangunan *community resilience* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Perumusan strategi dalam membangun *community resilience* guna menanggulangi terorisme di Surabaya diperlukan kerjasama yang baik antar *stakeholder* yang memiliki kewenangan. Sinergi antar lembaga sangat diperlukan dalam pembangunan *community resilience*, karena pada aksi terorisme di Surabaya tahun 2018 lalu menggunakan metode bom baru dengan pelaku satu keluarga dan meledakkan dirinya di tiga tempat berbeda. Maka dari itu, diperlukan strategi yang tepat dalam penanggulangannya agar hal serupa tidak terjadi lagi. Adapun strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun

*community resilience* dalam menanggulangi terorisme di Surabaya adalah:

1. *Ends*

Terwujudnya penanggulangan terorisme secara efektif di Kota Surabaya

2. *Ways*

Terdapat 3 strategi yang dilakukan dalam penanggulangan terorisme secara efektif di Kota Surabaya, yaitu strategi nasional, strategi internal dan strategi eksternal

3. *Means*

Pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerjasama untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme berskala nasional, Optimalisasi implementasi UU Tindak Pidana Terorisme, lembaga daerah hingga lembaga masyarakat terkecil seperti RT/RW perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan terjadi di lingkungan sekitar, efektivitas penggunaan dan pengembangan aplikasi SIPANDU sebagai kontrol dan pemantauan masyarakat yang tinggal di wilayah Surabaya serta kerjasama regional dan internasional dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti memberikan beberapa

rekomendasi strategi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya dalam menanggulangi aksi terorisme melalui pembentukan *Community Resilience*, yakni:

1. Pemerintah Kota Surabaya beserta stakeholder yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal
2. Kodim perlu memaksimalkan pelaksanaan kewenangan melalui tiga pilar pemerintahan guna menanggulangi ancaman terorisme dengan modus/metode bom baru
3. Polres sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, perlu memaksimalkan jumlah SDM (personel) agar pengamanan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan
4. RT/RW sebagai lembaga masyarakat terkecil perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada masyarakat terkait ancaman-ancaman yang ada di lingkungan sekitar
5. Peningkatan peran serta masyarakat yang peduli, peka dan terbuka untuk saling berbagi informasi terhadap

keamanan wilayah dengan mengefektifkan kegiatan Bu Mantik dan pengoptimalan aplikasi SIPANDU

## Daftar Pustaka

- Bachri, B. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- BPS Kota Surabaya. (2020). KOTA SURABAYA DALAM ANGKA (SURABAYA MUNICIPALITY IN FIGURES) 2020. CV. Azka Putra Pratama. Retrieved from <https://surabayakota.bps.go.id/publication/download.html?nrbfveve=NGI1NTA2YjdhMDg5YTYxYzZc1ZWY2Y2M5&xzmn=aHRocHM6Ly9zdXJhYmF5YWtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmVpY2FoaW9uLzlwjAvMDUvMTkvNGI1NTA2YjdhMDg5YTYxYzZc1ZWY2Y2M5L2tvdGEtYyYwJheWEtZGFsYWotYW5na2EtMjAyMjA2MDg1>
- Cresswell. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi 4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- detiknews.com. (2018). Cegah Teroris, Wali Kota Risma Minta Bumantik Jadi 'Mata-mata'. (Z. Effendi, Ed.) Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4045526/cegah-teroris-wali-kota-risma-minta-bumantik-jadi-mata-mata>
- Humas.surabaya.go.id. (2020). Jadi Pembicara di Forum Internasional, Wali Kota Risma Ungkap Strategi Penanganan Terorisme di Surabaya. Surabaya. Retrieved from <https://humas.surabaya.go.id/2020/07/31/jadi-pembicara-di-forum-internasional-wali-kota-risma-ungkap-strategi-penanganan-terorisme-di-surabaya/>
- jatim.antaranews.com. (2018). Risma Gelar Rapat Tiga Pilar Cegah Terorisme di Surabaya. (purnomo). Retrieved from <https://jatim.antaranews.com/berita/258928/risma-gelar-rapat-tiga-pilar-cegah-terorisme-di-surabaya>
- Jatimpos.co. (2020). Sisi Lain Peran Bumantik Redam Radikalisme. Jatimpos.co. Retrieved from <https://www.jatimpos.co/surabaya/2781-sisi-lain-peran-bumantik-redam-radikalisme>
- kumparan.com. (2018). Terorisme di Surabaya dengan Aplikasi 'Sipandu'. Retrieved from <https://kumparan.com/ngopibareng/cegah-terorisme-di-surabaya-dengan-aplikasi-sipandu/full>
- Liputan6.com. (2018). Ibu-Ibu Pemantau Jentik Nyamuk Mata-mata Teroris di Surabaya. (D. Kurniawan, Ed.) Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/3544873/ibu-ibu-pemantau-jentik-nyamuk-mata-mata-teroris-di-surabaya>
- news.detik.com. (2018). Sipandu, Aplikasi Baru untuk Antisipasi Bibit Teroris di Surabaya. (Z. Effendi, Ed.) Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4035247/sipandu-aplikasi-baru-untuk-antisipasi-bibit-teroris-di-surabaya>
- Pemkot Surabaya. (2018). *Informasi Publik*. Retrieved from <https://bappeko.surabaya.go.id/images/File%20Upload/RPJMD-2016-2021.pdf>
- PP Nomor 77. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019*. Republik Indonesia.

- Rijal, N. (2016). *Respons Pemerintah Lokal terhadap Ancaman Terorisme Global: Kasus ISIS di Kota Malang*. Global Strategis.
- Roach. (2011). *The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism*. New York: Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, F. (2019). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia. *Global Jurnal Politik Internasional*. Retrieved from <https://doi.org/10.7454/global.v2i1>
- UU Nomor 5. (2018). *UU Nomor 5 Tahun 2018*. Republik Indonesia.

## Lampiran

### Pedoman Wawancara

#### **Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya ?**

- (a) Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait kasus bom bunuh diri oleh pelaku di Surabaya pada tahun 2018?
- (b) Menurut bapak/ibu, apa penyebab terjadinya kasus bom bunuh diri oleh pelaku di Surabaya pada tahun 2018?
- (c) Apa saja dampak yang dirasakan dari adanya kasus tersebut?
- (d) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait peran lembaga/instansi yang memiliki wewenang dalam merespon kasus bom bunuh diri tersebut?
- (e) Upaya apa saja yang telah dilakukan instansi/lembaga terkait dalam penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya dalam aksi bom bunuh diri oleh pelaku di Surabaya tahun 2018?
- (f) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh instansi tempat bapak/ibu dalam penanggulangan terorisme oleh pelaku bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018?
- (g) Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pentingnya ketahanan komunitas (*community resilience*) dalam penanggulangan aksi terorisme?
- (h) Bagaimana kondisi ketahanan masyarakat Surabayasebelum dan sesudah tragedi ledakan bom 2018 terjadi?
- (i) Berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat sekitar lokasi kejadian untuk beradaptasi pasca peristiwa bom bunuh diri tersebut?
- (j) Bagaimana pendayagunaan fungsi lembaga bapak/ibu yang ada di Surabayasebelum dan sesudah tragedi ledakan bom 2018?
- (k) Apa saja daya akses informasi dan teknologi yang digunakan di Surabaya untuk menanggulangi terorisme? Apakah berjalan efektif?
- (l) Bagaimana mengenai adanya Aplikasi Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk) dalam penanggulangan terorisme khususnya di Surabaya? Apakah sudah efektif?
- (m) Apakah masyarakat sudah cukup teredukasi / tersosialisasikan mengenai fungsi aplikasi tersebut (Sipandu) dalam menanggulangi ancaman terorisme?
- (n) Jaringan sosial apa saja yang terbentuk dalam komunitas masyarakat di Surabaya dalam menanggulangi terorisme, baik sebelum ataupun setelah tragedi bom bunuh diri 2018 ?
- (o) Bagaimana mengenai jaringan ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) dalam penanggulangan terorisme khususnya di Surabaya ? Apakah sudah efektif?

- (p) Bagaimana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun *community resilience* guna menanggulangi terorisme di Surabaya? Apakah sudah efektif?
- (q) Strategi apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun Ketahanan masyarakat (*community resilience*) guna menanggulangi terorisme di Surabaya?

**Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya dalam Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya ?**

- (a) Apa saja produk hukum/peraturan pemerintah kota Surabaya terkait tindak pidana terorisme? Apakah peraturan yang ada telah berjalan efektif sebagaimana mestinya?
- (b) Bagaimana sinergitas antara instansi dan *stakeholder* terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme di Kota Surabaya ?
- (c) Apakah ada kendala terkait komunikasi dan interaksi antar instansi penanggulangan tindak pidana terorisme di Kota Surabaya?
- (d) Menurut bapak/ibu, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
- (e) Seberapa penting peran instansi bapak/ibu dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme? Khususnya untuk kasus bom bunuh diri kemarin?
- (f) Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana terorisme di Surabaya?
- (g) Bagaimana pemerintah Surabaya memanfaatkan *community resilience* sebagai strategi dalam

- menanggulangi terorisme khususnya di Surabaya ?
- (h) Apa ada kendala dalam pemanfaatan *community resilience* sebagai strategi dalam menanggulangi terorisme khususnya di Surabaya?
- (i) Selain kendala, adakah faktor yang menjadi pendorong pemerintah kota Surabaya dalam membangun *community resilience* di Surabaya ?
- (j) Bagaimana upaya meningkatkan sinergitas penanggulangan tindak pidana terorisme di Surabaya ?
- (k) Apakah upaya tersebut sudah tepat, atau masih perlu peningkatan?
- (l) Bagaimana strategi kedepan dalam membangun *community resilience* sebagai penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya di Surabaya?
- (m) Bagaimana solusi dan strategi dalam meningkatkan keamanan di Surabaya dari sasaran serangan terorisme?
- (n) Apa harapan kedepan kepada Kementerian/Lembaga lain terkait penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia (khususnya di Kota Surabaya)?
- (o) Menurut anda, apakah saran bagi kami selaku Akademisi guna membantu menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia?